

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PRIBADI MANTAN DIREKSI ATAS UTANG PAJAK PASCA
KEPAILITAN PERSEROAN MENURUT UNDANG-UNDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SERTA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
41/PUU-XVIII/2020)**

SKRIPSI

Oleh

Yushar Catrena Putra

2340058027



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PRIBADI MANTAN DIREKSI ATAS UTANG PAJAK PASCA
KEPAILITAN PERSEROAN MENURUT UNDANG-UNDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SERTA UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
41/PUU-XVIII/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Yushar Catrena Putra

2340058027



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Yushar Catrena Putra
NIM : 2340058027
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi atas Utang Pajak Pasca Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Kepailitan

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020)” adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya skripsi saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya skripsi ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Yushar Catrena Putra
2340058027



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi
atas Utang Pajak Pasca Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang
Kepailitan
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020)”**

Oleh:

Nama : Yushar Catrena Putra
NIM : 2340058027
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum
Program sarjana Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui:

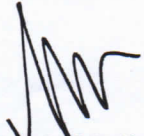
Pembimbing I

Pembimbing II


(Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)
NUPTK: 7252746647130103


(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUPTK: 5434757658137093

Ketua Program Studi Hukum


(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NUPTK: 5759741642230062


(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUPTK: 5434757658137093





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yushar Catrena Putra
NIM : 2340058027
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi atas Utang Pajak Pasca Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020)”** oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji		Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
2	Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Anggota	
3	Asst. Prof. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yushar Catrena Putra
NIM : 2340058027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban
Pribadi Mantan Direksi atas Utang Pajak Pasca
Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta
Undang-Undang Kepailitan (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/
2020).

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 3 Februari 2026

Yushar Catrena Putra
2340058027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi atas Utang Pajak Pasca Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

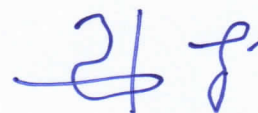
1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA, CPCD. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Prof. Dr. Hulman Panjaitan SH, MH. selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Hendri Jayadi, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, koreksi dan motivasi kepada penulis;
4. Segenap civitas academica Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman hukum yang telah diberikan selama masa dan proses perkuliahan;

5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberi izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi ini;
6. Pimpinan Kanwil DJP Jakarta Pusat serta rekan-rekan di Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Pusat, khususnya kepada rekan kami; Mutiara Yusdhiana, Fauzan Adibtama atas bantuan, dukungan, dan kerja sama yang diberikan;
7. Keluarga, kerabat, sahabat dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa RPL dari Direktorat Jenderal Pajak; Ilham Permana, Ani Natalia, Petrus Tulus Simanulang, Mursal Harahap, yang telah bersama-sama berjuang, saling berbagi informasi serta saling mengingatkan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta; Wini Windari, Ayunanda Alifia Putri, Ayunindya Alfiani Putri, yang dengan penuh kesabaran, pengertian dan do'a setia mendampingi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi perpajakan, baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

Jakarta, 3 Februari 2026
Penulis



Yushar Catrena Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	13
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Jenis Data dan Bahan Hukum	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Pengolahan Data	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kerangka Teori	21
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	23
2. Teori Pertanggungjawaban Direksi (<i>Business Judgement Rule & Fiduciary Duty</i>) ³¹	
B. Kerangka Konsep	33

1. Pertanggungjawaban hukum	33
2. Perseroan	34
3. Utang Pajak.....	37
4. Kepailitan.....	40
5. Perlindungan Hak Konstitusional.....	46

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI MANTAN DIREKSI PERSEROAN TERHADAP UTANG PAJAK SETELAH PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT 48

A. Hasil Penelitian terkait Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi Perseroan terhadap Utang Pajak setelah Perseroan Dinyatakan Pailit menurut Ketentuan UU KUP Dan UU Kepailitan.....	48
1. Ketentuan UU KUP tentang Pertanggungjawaban Pengurus.....	48
2. Ketentuan UU Kepailitan tentang Kedudukan Direksi Pasca Pailit.....	55
3. Hasil Temuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU/VIII/2020	58
B. Analisis terkait Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Pengurus Perseroan Terhadap Utang Pajak setelah Perseroan Dinyatakan Pailit menurut Ketentuan UU KUP Dan UU Kepailitan Menggunakan Teori Pertanggungjawaban Direksi (Fiduciary Duty and Business Judgment Rule)	64
1. Pertanggungjawaban Direksi dalam Perspektif UU KUP	64
2. Perubahan Kedudukan Direksi Pasca Pailit Menurut UU Kepailitan	65
3. Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Prinsip Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule.....	66
4. Implikasi Analisis	66

BAB IV KONSEKUENSI KETIDAK PASTIAN HUKUM ATAS TIDAK DICANTUMKANNYA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR PENGHAPUSAN NPWP 68

A. Hasil Penelitian terkait Konsekuensi Ketidakpastian Hukum atas Tidak Dicantumkannya Insolvensi sebagai Dasar Penghapusan NPWP dalam UU KUP terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Direksi	68
1. Ketentuan UU KUP tidak mencantumkan insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP	68
2. Pelepasan kewenangan direksi setelah pailit	74
3. Tidak adanya norma yang menghubungkan kepailitan dengan penghentian kewajiban pajak.....	79
B. Analisis terkait Konsekuensi Ketidakpastian Hukum atas Tidak Dicantumkannya Insolvensi sebagai Dasar Penghapusan NPWP dalam UU KUP terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Direksi	88
1. Konsekuensi Ketidakpastian Hukum atas Tidak Dicantumkannya Insolvensi sebagai Dasar Penghapusan NPWP dalam UU KUP terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Direksi	89

2. Pelepasan kewenangan direksi setelah pailit	90
3. Tidak adanya norma yang menghubungkan kepailitan dengan penghentian kewajiban pajak.....	91
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



ABSTRAK

- A. Nama : Yushar Catrena Putra
B. NIM : 2340058027
C. Bagian : Praktisi Hukum
D. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pribadi Mantan Direksi atas Utang Pajak Pasca Kepailitan Perseroan Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020).
E. Halaman : i – xv, 97 Halaman + Daftar Pustaka.
F. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pribadi Direksi, Utang Pajak, Kepailitan Perseroan, UU KUP, Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XVIII/2020.
G. Ringkasan Isi :

Ketegangan normatif dalam praktik penegakan hukum tercermin pada perkara kepailitan PT United Coal Indonesia (PT UCI), ketika utang pajak yang telah dimasukkan ke dalam daftar piutang boedel pailit dan diselesaikan oleh kurator berdasarkan penetapan hakim pengawas tetap ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada mantan direksi secara pribadi, sehingga menimbulkan problematika keadilan substantif dan menunjukkan ketidakharmonisan antara rezim hukum perpajakan dan hukum kepailitan dalam penafsiran batas pertanggungjawaban pribadi pengurus pascakepailitan. Rumusan masalah mencakup: (1) pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit menurut ketentuan UU KUP dan UU Kepailitan dan (2) konsekuensi ketidakpastian hukum atas tidak dicantumkannya insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP dalam UU KUP memengaruhi perlindungan hak konstitusional mantan direksi perseroan pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan atas utang pajak pascakepailitan dalam perspektif UU KUP dan UU Kepailitan, termasuk implikasi ketiadaan pengaturan insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus atas utang pajak pascakepailitan pada prinsipnya tidak dibenarkan menurut UU KUP, UU Kepailitan, dan Putusan MK No. 41/PUU-XVIII/2020, kecuali terbukti adanya kesalahan atau kelalaian sebelum pailit yang menyebabkan utang pajak tidak tertagih. Kemudian ketiadaan pengaturan insolvensi sebagai dasar penghapusan atau penyesuaian NPWP dalam UU KUP menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

membebani mantan direksi dengan kewajiban pajak di luar kapasitas hukumnya, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan konstitusional. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawabn direksi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pribadi mantan pengurus atas utang pajak pascakepailitan hanya dimungkinkan secara eksepsional apabila terbukti kesalahan sebelum pailit, sedangkan selebihnya berada pada kurator dan boedel pailit. Sedangkan tidak diaturnya insolvensi sebagai dasar penghapusan atau penyesuaian NPWP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mantan direksi dan menuntut pembaruan regulasi.

H. Daftar Acuan : 18 Buku + 3 Peraturan perundang-undangan + 1 Artikel Ilmiah + 14 Internet.

I. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.



ABSTRACT

- A. Name : Yushar Catrena Putra
B. NIM : 2340058027
C. Major : Legal Practitioner
D. Title : Legal Review of the Personal Liability of Former Directors for Tax Debts Following the Company's Bankruptcy According to the Law on General Provisions and Tax Procedures and the Bankruptcy Law (Study of Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XVIII/2020)
E. Page : i – xv, 97 pages + Bibliography
F. Keywords : Personal Liability of Directors, Tax Debts, Company Bankruptcy, KUP Law, Constitutional Court Decision 41/PUU-XVIII/2020
G. Summary :

This study examines the normative tension between tax law and insolvency law in Indonesia, as reflected in the bankruptcy case of PT United Coal Indonesia (PT UCI), where tax liabilities that had been included in the bankruptcy estate (boedel pailit) and settled by the curator pursuant to a supervisory judge's order were nonetheless pursued personally against former directors by the Directorate General of Taxes. This practice raises issues of substantive justice and demonstrates disharmony in interpreting the limits of personal liability of corporate officers after bankruptcy. Accordingly, the research addresses two main problems: (1) the personal liability of former corporate management for tax debts after the company has been declared bankrupt under the General Tax Provisions and Procedures Law (UU KUP) and the Bankruptcy Law; and (2) the legal consequences of the absence of insolvency as a ground for the deregistration or adjustment of a taxpayer identification number (NPWP) under the UU KUP in relation to the constitutional rights of former directors.

Using a normative juridical approach grounded in legal certainty theory and directors' liability theory, this study finds that personal liability of former directors for post-bankruptcy tax debts is, in principle, unjustifiable under the UU KUP, the Bankruptcy Law, and Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XVIII/2020, except where concrete fault or negligence prior to bankruptcy is proven to have caused the tax debt to become uncollectible. Furthermore, the absence of explicit regulation on insolvency as a basis for NPWP deregistration creates significant legal uncertainty and risks imposing tax obligations on former directors beyond their legal capacity, thereby undermining legal certainty and constitutional protection. The study

concludes that directors' personal liability after bankruptcy is strictly exceptional, while the remaining responsibility for tax settlement rests with the curator and the bankruptcy estate, and that regulatory reform is necessary to integrate insolvency status into tax administration.

H. Reference List : 18 Books + 3 Legislation + 1 Scientific Articles + 14 Internet.

I. Supervisor I : Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H..

Supervisor II : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

